

PEMANFAATAN INTERNET SEBAGAI MEDIA KOMUNIKASI OLEH PENGELOLA SEKRETARIAT DEWAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI

Utilization of Internet as a Communication Media by Staff of Provincial Food Security Council Secretariat

Munawar Khalil N¹, Amiruddin Saleh², Basita Ginting²

¹ Staf Sekretariat Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian

² Dosen Program Studi Komunikasi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan,
Pascasarjana Institut Pertanian Bogor
email: khalilmunawar888@yahoo.co.id

ABSTRACT

This research work was carried out to analyze the utilization of internet as a communication media by Staff of Provincial DKP Secretariat. The population of the study is Staff of Provincial DKP Secretariat in 34 province in Indonesia. Survey method of the research and stratified random sampling were used to select 68 Staff for the study. The data was presented and analyzed in tables and average scores. The research found that internet exposure of Staff of Provincial DKP Secretariat is high. However, its utilization is still low. The research also showed that: (1) individual characteristics (age, period of work, and training) are significantly correlated with internet exposure (frequency and channel variety); (2) motivation (intrinsic motivation) is significantly correlated with internet exposure (duration and the situation of exposure); (3) internet exposure (duration, frequency, and the situation of exposure) are significantly correlated with utilization of internet (communication and coordination).

Keywords: *Communication Media, Internet, Provincial DKP Secretariat*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan internet oleh Pengelola Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan (DKP) Provinsi. Penelitian ini mengambil sampel dari 34 provinsi seluruh Indonesia dengan metode *stratified sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelola Sekretariat DKP Provinsi mempunyai tingkat keterdedahan yang cukup tinggi terhadap internet. Akan tetapi, pemanfaatan internet untuk mendukung tugas dan fungsi Pengelola Sekretariat DKP Provinsi masih rendah, terutama dari aspek komunikasi dan sosialisasi. Penelitian ini juga menemukan bahwa: (1) karakteristik individu pada indikator umur, masa kerja, dan pelatihan berhubungan nyata dengan keterdedahan internet pada indikator frekuensi dan ragam saluran; (2) motivasi intrinsik berhubungan nyata dengan keterdedahan internet pada indikator durasi dan situasi keterdedahan; (3) keterdedahan internet pada indikator durasi,

frekuensi, dan situasi keterdedahan berhubungan nyata dengan pemanfaatan internet pada indikator komunikasi dan koordinasi.

Kata Kunci: Media Komunikasi, Internet, Pengelola Sekretariat DKP Provinsi

PENDAHULUAN

Pembangunan ketahanan pangan merupakan hal yang penting dan strategis mengingat pangan merupakan hak dasar manusia yang paling utama. Pemenuhan kebutuhan pangan adalah bagian dari hak asasi setiap individu. Pemenuhan kecukupan pangan bagi rakyat merupakan kewajiban baik secara moral, sosial, maupun hukum. Selain itu, pemenuhan kecukupan pangan merupakan investasi pembentukan sumber daya manusia (SDM) yang lebih baik dan prasyarat bagi pemenuhan hak-hak dasar lainnya seperti pendidikan dan pekerjaan (Suryana 2014; Rachmat 2015).

Pembangunan ketahanan pangan meniscayakan teknologi informasi dan komunikasi. Salah satu tugas pemerintah adalah menyebarluaskan informasi dan kebijakan pemerintah sesuai dengan institusi/lembaga masing-masing kepada publik, menampung dan mengolah aspirasi masyarakat, serta membangun kepercayaan publik guna menjaga citra dan reputasi pemerintah. Untuk itu, diperlukan upaya-upaya kreatif dan persuasif dalam pelaksanaan misi tersebut. Pemerintah harus mengomunikasikan kebijakan, rencana kerja, dan capaian kinerja kepada masyarakat luas. Memanfaatkan internet merupakan pilihan yang tepat seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi yang semakin maju. Penyediaan *website* dan pembuatan akun di media sosial misalnya, dapat dimanfaatkan sebagai media komunikasi agar diseminasi informasi berlangsung secara cepat dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Komunikasi yang menggunakan media baru atau teknologi internet dapat menjangkau langsung dan cepat kepada semua pihak. Karakteristik internet yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun memungkinkan terjadinya akselerasi pengetahuan dan dinamika komunikasi yang mendukung proses pembangunan.

Ketersediaan akses internet yang merata di seluruh Indonesia merupakan salah satu faktor kunci dalam pembangunan nasional. Pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 telah berkomitmen untuk menyediakan infrastruktur teknologi komunikasi ke seluruh wilayah Indonesia untuk menciptakan konektivitas antardaerah. Hasil survei Asosiasi Pengguna Jasa Internet Indonesia (APJII) Tahun 2016 menyebutkan bahwa penetrasi internet secara nasional berada di angka 51,55%, namun masih belum merata ke seluruh wilayah. Khazaeli dan Stockemer (2013) menemukan bahwa penetrasi internet memiliki pengaruh positif dalam pemerintahan. Negara-negara dengan penetrasi internet yang lebih tinggi pada umumnya lebih baik dan mempunyai kondisi pemerintahan yang lebih stabil, tanpa melihat rezim yang memerintah.

Implementasi internet di bidang pemerintahan dikenal dengan istilah *e-government*, yaitu upaya penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi

informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien (Nugroho 2015). Menurut Chuzairi (2016) implementasi *e-government* di Indonesia tergolong lambat dikarenakan beberapa faktor seperti infrastruktur belum merata, kemampuan SDM yang tergolong rendah, serta variasi budaya masyarakat Indonesia yang berbeda-beda. Pada saat yang sama, pengguna internet terus mengalami peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Hasil survei APJII menyebutkan jumlah pengguna internet tahun 2014 mencapai 88,1 juta orang, dan mengalami peningkatan menjadi 132,7 juta orang pada tahun 2016. Hal ini menjadi tantangan yang besar bagi aparatur pemerintah untuk memanfaatkan internet secara optimal dalam mendukung implementasi *e-government* menuju pelayanan publik yang lebih baik. Setiawan dan Santoso (2013) mengatakan esensi dari *e-governance* adalah hubungan timbal balik antara pemerintah (penyelenggara otoritas negara) dengan rakyat atau warga negara. Ukuran keberhasilan *e-governance* dalam hal ini adalah, hubungan timbal balik yang saling memperkuat ataupun saling memperbaiki antara keduanya. Pemerintah sebagai penyelenggara negara diharapkan memberikan pelayanan yang maksimal dan adil berkat komunikasinya yang membaik dengan masyarakat.

Institusi Dewan Ketahanan Pangan (DKP) Provinsi merupakan wadah koordinasi lintas sektor untuk merumuskan kebijakan ketahanan pangan daerah. Pengelola Sekretariat DKP Provinsi merupakan aparatur pemerintah yang secara fungsional bertugas untuk mendukung kinerja DKP Provinsi. Terdapat tiga aspek yang harus dimiliki oleh Pengelola Sekretariat DKP Provinsi, yaitu: pertama, komunikasi dengan para pemangku kepentingan terkait. Pengelola Sekretariat DKP Provinsi dituntut untuk mampu membangun komunikasi dengan berbagai kelompok masyarakat, politik, swasta dan pemangku kepentingan lainnya dengan tujuan untuk mendapat masukan terkait pembangunan ketahanan pangan daerah. Internet membuka ruang yang begitu besar bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif memberikan kontribusi dalam mengarahkan kebijakan pemerintah. Briones *et al.* (2011) menunjukkan keberhasilan Palang Merah Amerika dalam penggunaan media internet secara dialogis yang ditunjukkan dengan merespon secara aktif berbagai postingan di media sosial serta menyerap ide-ide dari warganet yang beragam. Kedua, pengelola sekretariat DKP provinsi dituntut untuk mampu melakukan sosialisasi kebijakan pemerintah di bidang ketahanan pangan. Ketiga, koordinasi dengan Pengelola Sekretariat DKP di level pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Dengan demikian, Pengelola Sekretariat DKP Provinsi sebagai unsur pendukung dalam institusi DKP Provinsi dituntut untuk mampu memainkan peran optimal dalam mendukung terwujudnya pembangunan ketahanan pangan daerah. Hal ini juga merupakan suatu upaya untuk mewujudkan *open government* yang mencakup tiga unsur, yaitu transparansi, partisipasi, dan kolaborasi (Gunawong 2015). Melihat perkembangan internet dan implementasinya dalam bidang pemerintahan, menarik untuk melihat seperti apa pemanfaatan internet oleh Pengelola Sekretariat DKP Provinsi dilihat dari ketiga aspek tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, terdapat dua hal yang mendasari mengapa hal ini perlu dikaji yaitu, perkembangan teknologi komunikasi dan kemampuan aparatur pemerintah beradaptasi dengan perubahan. Giles (2003) menyebutkan dua aspek yang menentukan perkembangan media adalah teknologi dan budaya. Teknologi komunikasi meniscayakan perubahan pada media, dari *tribal era* hingga *electronic era* (West dan Turner 2010). Media massa konvensional seperti surat kabar, majalah, radio dan televisi pada awalnya menempatkan khalayak sebagai entitas yang pasif, namun seiring perkembangan, media internet menggeser kuasa media ke kuasa khalayak. Khalayak mempunyai kebebasan untuk memilih media mana yang diinginkan. Selain itu, khalayak juga mempunyai ruang yang besar untuk menentukan agenda media.

Hasil Survei APJII tahun 2016 menyebutkan pengguna internet dari kalangan pekerja mencapai 62%, jauh lebih banyak dibanding profesi lainnya seperti ibu rumah tangga (16,6%), mahasiswa (7,8%), dan pelajar (6,3%). Tujuan penggunaan internet antara lain untuk meng-*update* informasi (25,3%), terkait pekerjaan (20,8%), mengisi waktu luang (13,5%), hiburan (8,8%), dan bisnis/berdagang (8,2%). Data tersebut memang tidak menunjukkan profesi aparatur sipil negara secara rinci, namun menurut BPS 2015, jumlah aparatur sipil negara seluruh Indonesia sebesar 4,45 juta orang atau 1,7% dari jumlah penduduk, dan sektor ini tentunya menjadi bagian dari 62% pengguna internet berdasarkan profesi. Hal ini diperkuat dengan hasil survei yang dilakukan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri 2016) terhadap 1.600 pegawai negeri di seluruh Indonesia yang menunjukkan bahwa 72,94% pegawai negeri sudah menggunakan *smartphone*, dan sebesar 66% penggunaannya untuk mendukung pekerjaan. Internet bukan lagi barang asing bagi aparatur pemerintah. Secara kelembagaan, pemerintah mendorong pemanfaatan internet melalui implementasi *e-governance*. Kepemilikan media komunikasi berbasis internet memang cenderung tinggi (Korpri 2016), tetapi masih ditemukan kendala dari sisi kemampuan SDM aparatur itu sendiri dalam beradaptasi dengan perkembangan TIK, seperti literasi internet yang masih rendah (Rustam 2014), literasi informasi yang belum merata (Dhita 2012), perubahan budaya kerja manual ke digital (Darmajaya 2016).

Terkait dengan pembangunan ketahanan pangan, media merupakan salah satu pemangku kepentingan yang mempunyai peran penting dan strategis. Pemerintah melihat pentingnya sinergi dengan media dengan membuka ruang untuk menampung dinamika yang terjadi di dalam masyarakat. Krisis pangan di suatu daerah yang dimuat di media sosial atau media *online* akan sangat cepat diketahui sehingga membantu pemerintah dalam mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menangani permasalahan tersebut. Selaras dengan itu, pemerintah melalui kebijakan *e-government* juga sudah menggunakan teknologi komunikasi yang mampu memperpendek jarak antara pemerintah dan masyarakat, memanfaatkan berbagai media komunikasi sehingga pelayanan pemerintah lebih efektif dan efisien. Pada akhirnya dapat memberikan

pelayanan publik yang lebih baik dari hanya mengandalkan jalur birokrasi konvensional. Oleh karena itu, kemampuan aparatur negara dalam memanfaatkan internet sebagai media komunikasi yang mendukung tugas dan fungsinya menjadi suatu keharusan. Dengan demikian, menarik untuk menganalisis pemanfaatan internet oleh Pengelola Sekretariat DKP Provinsi sebagai media komunikasi.

Tujuan penelitian ini adalah: (1) menganalisis hubungan karakteristik individu dengan keterdedahan internet oleh Pengelola Sekretariat DKP Provinsi; (2) menganalisis hubungan motivasi dengan keterdedahan internet oleh Pengelola Sekretariat DKP Provinsi; dan (3) menganalisis hubungan keterdedahan internet dengan tingkat pemanfaatan internet oleh Pengelola Sekretariat DKP Provinsi.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei bersifat deskriptif korelasional, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan pemanfaatan internet oleh Pengelola Sekretariat DKP Provinsi dan menganalisis hubungan antarpeubah yang diteliti.

Penelitian ini mencakup 34 provinsi seluruh Indonesia untuk mendapatkan gambaran secara nasional mengenai pemanfaatan internet oleh Pengelola Sekretariat DKP Provinsi. Teknik pengambilan sampel menggunakan *stratified sampling*, sehingga diperoleh 68 sampel. Waktu penelitian dilakukan pada bulan April – Juni 2017. Pengumpulan data menggunakan kuesioner dan panduan wawancara. Analisis data menggunakan analisis statistik deskriptif dan analisis inferensial menggunakan koreasi *rank* Spearman, dengan dibantu aplikasi SPSS versi 20.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Umum

Dewan Ketahanan Pangan (DKP) merupakan lembaga non struktural yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan. DKP bertujuan untuk mendukung terwujudnya pembangunan ketahanan pangan berdasarkan kedaulatan pangan dan kemandirian pangan. Ketahanan pangan mencakup aspek yang kompleks dan bersidat multi dimensional, sehingga diperlukan suatu wadah koordinasi ketahanan pangan dengan mempertimbangkan berbagai perubahan lingkungan strategis. Dengan adanya DKP, aspek-aspek tersebut dapat ditangani secara sinergis dan terintegrasi. DKP mempunyai tugas membantu Presiden dalam: (a) merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional; (b) melaksanakan evaluasi dan pengendalian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional (DKP 2010).

Suryana (2014) mengemukakan ruang lingkup ketahanan pangan dapat dilihat pada UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dan dapat dibagi ke dalam tiga subsistem yaitu ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, dan pemanfaatan pangan.

Dalam pelaksanaan tugas DKP provinsi dibantu oleh Pengelola Sekretariat DKP Provinsi yang secara *ex-officio* dilaksanakan oleh dinas/badan/unit kerja yang menangani ketahanan pangan provinsi. Penunjukan sebagai Pengelola Sekretariat DKP Provinsi berada di bawah kewenangan kepala dinas/unit kerja ketahanan pangan provinsi selaku Sekretaris DKP Provinsi. Olehnya itu, karena mekanisme pengangkatan sebagai Pengelola Sekretariat DKP Provinsi secara detail tidak diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan, maka mekanismenya diserahkan kepada masing-masing DKP Provinsi apakah akan melakukan penunjukan secara langsung atau melalui Keputusan Sekretaris DKP Provinsi.

Karakteristik Individu

Secara struktural, Pengelola Sekretariat DKP Provinsi melekat pada dinas/unit kerja yang menangani ketahanan pangan provinsi, dan bekerja secara fungsional di DKP Provinsi. Karakteristik Pengelola Sekretariat DKP Provinsi yang diteliti adalah jenis kelamin, umur, masa kerja, pendidikan, pelatihan, dan kepemilikan TIK. Uraian secara rinci terkait karakteristik individu Pengelola Sekretariat DKP Provinsi disajikan dalam Tabel 1.

Data tersebut menunjukkan bahwa Pengelola Sekretariat DKP Provinsi didominasi oleh generasi X. Generasi ini merupakan *digital immigrant* yang sebagian masa hidupnya belum mengalami perkembangan teknologi internet. Hanya 5,88% dari responden yang termasuk ke dalam kategori *net generation*, yaitu generasi yang lahir dan tumbuh di tengah pesatnya perkembangan internet. Rentang usia responden ini dapat dipahami mengingat seleksi jabatan dan pencapaian karir di birokrasi pemerintahan mempunyai mekanisme tersendiri, di antaranya harus memenuhi persyaratan usia, pangkat, golongan, dan pengalaman. Pengelola Sekretariat DKP Provinsi merupakan jabatan non struktural yang pada umumnya dijabat oleh pejabat struktural di dinas terkait atau pegawai yang mempunyai masa kerja yang cukup lama.

Jenis kepemilikan TIK mayoritas responden memiliki dua jenis TIK yaitu sebesar 66,18%, kemudian secara berurutan 14,71% memiliki satu jenis TIK, 13,24% memiliki tiga jenis TIK, dan hanya 5,88% memiliki empat jenis TIK.

Smartphone merupakan jenis TIK yang paling banyak dimiliki oleh Pengelola Sekretariat DKP Provinsi. Pengelola Sekretariat DKP Provinsi ada yang memiliki lebih dari satu buah *smartphone*. Tingginya kepemilikan TIK oleh Pengelola Sekretariat DKP Provinsi disebabkan beberapa hal, antara lain: Pertama, pasar yang membanjiri Indonesia dengan gadget dan perangkat elektronik dengan kualitas dan harga bersaing. Survei e-marketer (Kominfo 2016) menyebutkan pertumbuhan pasar *smartphone* di Indonesia tertinggi di Asia dan Pasifik. Kedua,

Pengelola Sekretariat DKP Provinsi termasuk golongan kelas menengah yang memiliki kemampuan membeli perangkat elektronik. Ketiga, terdapat jenis TIK yang difasilitasi oleh kantor sehingga pegawai tidak perlu mengeluarkan biaya dari kantong sendiri.

Tabel 1. Jumlah dan persentase Pengelola Sekretariat DKP Provinsi berdasarkan peubah karakteristik individu

Karakteristik Individu	Jumlah (orang)	Persentase (%)
Jenis Kelamin		
Laki-Laki	43	63,24
Perempuan	25	36,76
Umur		
Muda (25 – 34 tahun)	4	5,88
Dewasa (35 – 50 tahun)	45	66,18
Tua (51 – 62 tahun)	19	27,94
Masa Kerja		
Singkat (1 – 2 tahun)	19	27,94
Sedang (3 – 5 tahun)	43	63,24
Lama (6 – 8 tahun)	6	8,82
Pendidikan		
Diploma	1	1,47
Sarjana	49	72,06
Magister	15	22,06
Doktor	3	4,41
Pelatihan		
Pernah	7	10,29
Belum Pernah	61	89,71
Kepemilikan TIK		
Satu Jenis	4	5,88
Dua Jenis	9	13,23
Tiga Jenis	45	66,18
Empat Jenis	10	14,71

Ket: n= 68

Motivasi Penggunaan Internet

Motivasi Pengelola Sekretariat DKP Provinsi dalam penggunaan internet dibedakan menjadi dua yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik terdiri dari memanfaatkan waktu, mengembangkan karir, dan meningkatkan potensi diri. Motivasi ekstrinsik terdiri dari kemudahan mendapat informasi, menunjang pekerjaan, ketersediaan jaringan, dan dukungan lingkungan kerja.

Tabel 2. Rataan skor motivasi Pengelola Sekretariat DKP Provinsi

Motivasi	Rataan Skor*
Motivasi Intrinsik	3,12
Motivasi Ekstrinsik	3,39

Ket: * Interval Skor 1,00 – 1,75=Sangat Rendah; 1,76 – 2,50=Rendah; 2,51 – 3,25=Tinggi; 3,26 – 4,00=Sangat Tinggi

Tabel 2 menunjukkan Pengelola Sekretariat DKP Provinsi menggunakan internet didorong oleh motivasi intrinsik berupa kebutuhan memanfaatkan waktu untuk mencari informasi tertentu. Internet juga digunakan sebagai sarana yang mendukung pengembangan karir dan juga untuk meningkatkan potensi diri, baik sebagai aparatur negara maupun sebagai bagian dari masyarakat informasi. Penggunaan internet oleh Pengelola Sekretariat DKP Provinsi juga tidak terlepas dari konektivitas internet saat ini yang semakin baik, perkembangan internet mendukung masyarakat untuk beralih dari komunikasi berbasis SMS/telepon ke komunikasi berbasis data, serta lingkungan kerja pegawai memberikan stimulus untuk menggunakan internet.

Keterdedahan Internet

Keterdedahan internet merupakan aktivitas penggunaan internet yang meliputi mencari, melihat, mendengar, dan membaca di internet yang terjadi pada Pengelola Sekretariat DKP Provinsi. Pengelola Sekretariat DKP Provinsi secara umum mempunyai tingkat keterdedahan internet yang cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari lima indikator keterdedahan internet dalam penelitian ini, yaitu durasi, frekuensi, ragam saluran, situasi keterdedahan, dan aspek ketahanan pangan.

Tabel 3. Rataan Skor Keterdedahan Internet oleh Pengelola Sekretariat DKP Provinsi

Keterdedahan Internet	Rataan Skor*
Durasi	2,30
Frekuensi	3,07
Ragam saluran	2,91
Situasi keterdedahan	2,79
Aspek ketahanan pangan	3,10

Ket: * Interval Skor 1,00 – 1,75=Sangat Rendah; 1,76 – 2,50=Rendah; 2,51 – 3,25=Tinggi; 3,26 – 4,00=Sangat Tinggi

Secara umum tingkat keterdedahan internet oleh Pengelola Sekretariat DKP Provinsi tinggi dilihat dari rataan skor, kecuali pada indikator durasi dengan rataan skor tergolong rendah. Durasi penggunaan internet oleh Pengelola Sekretariat DKP Provinsi dalam sekali akses 1-2 jam. Penelitian Elian (2014) juga menemukan durasi penggunaan internet penyuluh pertanian termasuk rendah (di bawah tiga jam). Ragam saluran yang paling banyak diakses adalah *email*, *website*, dan media sosial (*Whatsapp*). *Website* digunakan sebagai sumber informasi, sedangkan *email* dan *Whatsapp* merupakan media komunikasi yang

digunakan Pengelola Sekretariat DKP Provinsi untuk mendukung kelancaran pekerjaan. Tingginya kepemilikan *smartphone* mendukung penggunaan *internet mobile* dalam aktivitas keseharian baik untuk urusan kantor maupun urusan pribadi. Pengelola Sekretariat DKP Provinsi tidak lagi secara kaku memisahkan antara aktivitas internet di rumah maupun di kantor untuk keperluan pribadi maupun pekerjaan. Adanya *internet mobile* melalui perangkat *smartphone* sangat mendukung situasi ini. Dengan perkembangan internet, pola komunikasi birokrasi di pemerintahan mengalami perubahan yang cukup signifikan. Akan tetapi, juga patut diwaspadai ancaman *cyberloafing*, yaitu penyalahgunaan fasilitas internet kantor untuk kebutuhan pribadi pegawai. Hal ini dapat mengganggu kinerja sebagai aparatur pemerintah.

Aspek ketahanan pangan meliputi ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, konsumsi pangan, dan keamanan pangan. Pengelola Sekretariat DKP Provinsi menggunakan internet untuk mengakses aspek-aspek ketahanan pangan yang didasari pada kebutuhan ganda, yaitu sebagai bagian dari pemerintah sekaligus sebagai konsumen yang membutuhkan pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman. Keamanan pangan menjadi isu yang sensitif di masyarakat terutama ketika terdapat kasus pencemaran pangan. Demikian pula dengan harga pangan yang mempunyai dampak ekonomi yang besar. Kenaikan harga pangan memicu kenaikan barang lainnya sehingga berpotensi menimbulkan gejala ekonomi dan sosial.

Pemanfaatan Internet

Pemanfaatan internet adalah perilaku Pengelola Sekretariat DKP Provinsi dalam memanfaatkan internet yang dilihat dari tiga aspek, yaitu komunikasi, sosialisasi, dan koordinasi. Komunikasi adalah aktivitas mengirim dan menerima pesan melalui internet dengan berbagai kelompok masyarakat, politik, swasta, dan pemangku kepentingan lainnya. Sosialisasi adalah aktivitas menyebarkan kebijakan dan program pemerintah di bidang ketahanan pangan melalui internet. Koordinasi adalah aktivitas komunikasi dengan Pengelola Sekretariat DKP di semua tingkatan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program dan kegiatan DKP Provinsi dengan memanfaatkan media internet.

Koordinasi merupakan aktivitas komunikasi internal Pengelola Sekretariat DKP Provinsi, sementara komunikasi dan sosialisasi lebih kepada aktivitas komunikasi eksternal. Buluamang (2017) menyatakan aktivitas komunikasi eksternal terkait dengan pengomunikasian kebijakan publik yang bergantung pada kebijakan pimpinan yang langsung atau tidak langsung memengaruhi ruang gerak aparatur negara. Pada aktivitas komunikasi internal lebih mudah dilakukan karena terkait dengan kelancaran tugas-tugas keseharian. Hasil rata-rata skor indikator koordinasi yang lebih tinggi dibanding indikator komunikasi dan sosialisasi menunjukkan bahwa indikator koordinasi mempunyai ruang lebih terbuka terhadap komunikasi dialogis yang intens di antara Pengelola Sekretariat DKP Provinsi.

Tabel 4. Rataan Skor Pemanfaatan Internet oleh Pengelola Sekretariat DKP Provinsi

Pemanfaatan Internet	Rataan Skor*
Komunikasi	2,23
Sosialisasi	2,32
Koordinasi	2,66

Ket: *Interval Skor 1,00 – 1,75=Sangat Rendah; 1,76 – 2,50=Rendah; 2,51 – 3,25=Tinggi; 3,26 – 4,00=Sangat Tinggi

Tabel 4 menunjukkan bahwa rataan skor untuk komunikasi dan sosialisasi tergolong rendah, sedangkan indikator koordinasi tergolong tinggi. Hal ini menunjukkan Pengelola Sekretariat DKP Provinsi belum secara optimal memanfaatkan internet untuk membangun komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan terkait, antara lain kelompok masyarakat, politik, dan swasta yang konsen dalam pembangunan ketahanan pangan. Senada dengan indikator komunikasi, sosialisasi juga mempunyai rataan skor yang tergolong rendah yaitu 2,32. Artinya aktivitas menyebarkan kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah di bidang ketahanan pangan melalui internet masih belum dilakukan secara optimal. Secara kelembagaan sosialisasi memang sudah dilakukan melalui *website* resmi pemerintah daerah maupun oleh dinas/unit kerja ketahanan pangan provinsi.

Berbeda dengan skor rataan pada indikator komunikasi dan sosialisasi, skor rataan pemanfaatan internet untuk indikator koordinasi termasuk dalam kategori tinggi (2,66). Artinya Pengelola Sekretariat DKP Provinsi memanfaatkan internet dengan baik untuk melakukan koordinasi. Rataan skor yang tinggi untuk indikator koordinasi sejalan dengan karakteristik DKP itu sendiri sebagai wadah koordinasi bagi para pemangku kepentingan terkait untuk merumuskan kebijakan ketahanan pangan. Agenda utama DKP Provinsi adalah melakukan rapat koordinasi ketahanan pangan tingkat provinsi yang dipimpin oleh gubernur selaku ketua DKP provinsi dan dihadiri oleh dinas/instansi terkait ketahanan pangan serta kelompok kerja yang dibentuk sesuai kebutuhan masing-masing daerah. Dari rapat-rapat tersebut dihasilkan kebijakan yang akan diimplementasikan oleh dinas/unit kerja terkait sesuai dengan bidangnya masing-masing. Karena itu, peran Pengelola Sekretariat DKP Provinsi sangat penting dalam mendukung terlaksananya agenda tersebut.

Hubungan Karakteristik Individu dengan Keterdedahan Internet

Pengelola Sekretariat DKP Provinsi merupakan aparatur sipil negara yang juga mempunyai peran penting dalam pencapaian tujuan pembangunan. Kapasitas dan kompetensi yang memadai dibutuhkan untuk secara cermat berhadapan dengan dinamika dan kompleksitas pembangunan. Dalam kaitan tersebut, salah satu aspek yang penting untuk diperhatikan adalah kemampuan menggunakan internet sebagai media komunikasi.

Tabel 5. Hubungan Karakteristik Individu dengan Keterdedahan Internet oleh Pengelola Sekretariat DKP Provinsi

Karakteristik Individu Pengelola Sekretariat DKP Provinsi	Koefisien Korelasi Keterdedahan Internet				
	Durasi	Frekuensi	Ragam saluran	Situasi	Aspek Ketahanan Pangan
Umur (r_s)	-0.151	-0.131	-0.688**	-0.082	-0.054
Jenis Kelamin (χ^2)	0.542	0.483	0.867	0.374	0.332
Masa kerja (r_s)	0.014	-0.062	-0.244*	-0.039	-0.050
Pendidikan (r_s)	-0.157	-0.118	-0.021	0.211	0.061
Pelatihan (χ^2)	0.022*	0.019*	0.000**	0.783	0.454
Kepemilikan TIK (r_s)	0.092	-0.026	0.103	-0.065	-0.098

Ket: * signifikan pada $p < 0.05$
** signifikan pada $p < 0.01$

r_s : koefisien korelasi *rank* Spearman
 χ^2 : koefisien Chi Square

Tabel 5 menunjukkan umur dan masa kerja berhubungan nyata dengan ragam saluran komunikasi berbasis internet. Koefisien korelasi umur dan masa kerja yang negatif memberi arti arah hubungan dua indikator berlawanan, yaitu semakin tua usia Pengelola Sekretariat DKP Provinsi dan semakin lama masa kerjanya, maka semakin sedikit ragam saluran komunikasi berbasis internet yang digunakan. Seiring bertambahnya umur dan masa kerja akan terjadi perubahan psikologis yang memengaruhi keinginan. Penelitian ini sejalan dengan Blank (2013) yang menyatakan umur memengaruhi kekuatan fisik sehingga dapat memengaruhi kemampuan belajar. Pegawai yang berusia lebih muda cenderung lebih familiar dengan internet sehingga terbiasa dengan hal-hal baru, sedangkan pegawai berusia tua cenderung membutuhkan adaptasi yang lebih lama dengan perubahan, lebih menyukai hal-hal praktis dan apabila sudah nyaman dengan salah satu ragam saluran komunikasi berbasis internet, mereka akan cenderung pasif dengan saluran komunikasi lainnya. Hal ini dikuatkan dengan temuan Elian (2014) tentang penyuluh pertanian yang berusia muda lebih cakap menggunakan internet dibandingkan penyuluh berusia tua yang disebabkan keterbatasan keahlian mengakses internet dan keterbatasan fisik untuk berlama-lama di depan layar. Sejalan dengan itu, hasil kajian *Pew Research Center* (Poushter 2016) menyatakan bahwa generasi milenial (usia 18-34 tahun) lebih banyak menggunakan internet dan *smartphone* dibandingkan generasi di atasnya (35 tahun ke atas). Ini terjadi di hampir seluruh dunia baik di negara maju maupun berkembang. Pengguna internet yang lebih muda juga cenderung mengakses internet paling sedikit setiap hari dan lebih aktif menggunakan media sosial.

Hubungan Motivasi dengan Keterdedahan Internet

Motivasi yang dimiliki oleh Pengelola Sekretariat DKP Provinsi baik dari dalam dirinya sendiri maupun dari lingkungannya dapat memberikan dorongan untuk menggunakan internet sebagai media komunikasi. Keterdedahan internet yang memadai dari Pengelola Sekretariat DKP Provinsi akan memudahkan

pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai aparatur negara sehingga komunikasi pemerintahan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Hubungan motivasi dengan keterdedahan internet oleh Pengelola Sekretariat DKP Provinsi disajikan dalam Tabel 6.

Tabel 6. Hubungan Motivasi dengan Keterdedahan Internet oleh Pengelola Sekretariat DKP Provinsi

Motivasi	Koefisien Korelasi Keterdedahan Internet (r_s)				
	Durasi	Frekuensi	Ragam saluran	Situasi	Aspek Ketahanan Pangan
Motivasi Intrinsik	0.268*	0.176	-0.023	0.448**	0.041
Motivasi Ekstrinsik	0.096	0.037	-0.116	0.174	0.018

Ket: * signifikan pada $p < 0.05$ r_s = koefisien korelasi *rank* Spearman

** signifikan pada $p < 0.01$

Motivasi intrinsik berhubungan nyata dengan durasi serta berhubungan sangat nyata dengan situasi keterdedahan internet. Penggunaan internet oleh Pengelola Sekretariat DKP Provinsi didorong oleh keinginan untuk memanfaatkan waktu, mengembangkan karir, dan meningkatkan potensi diri. Situasi keterdedahan berupa tempat dan orientasi mengakses internet relatif lebih fleksibel. Pengelola Sekretariat DKP Provinsi terbiasa menggunakan internet di kantor maupun di rumah untuk menyelesaikan pekerjaan kantor.

Hubungan Keterdedahan Internet dengan Pemanfaatan Internet

Pemanfaatan internet yang diteliti meliputi tiga indikator yaitu komunikasi, sosialisasi, dan koordinasi. Untuk melihat hubungan antara keterdedahan internet dengan pemanfaatan internet oleh Pengelola Sekretariat DKP Provinsi, dilakukan uji korelasi *rank* Spearman, dan disajikan dalam Tabel 7.

Tabel 7. Hubungan Keterdedahan Internet dengan Pemanfaatan Internet oleh Pengelola Sekretariat DKP Provinsi

Keterdedahan Internet	Koefisien Korelasi Pemanfaatan Internet (r_s)		
	Komunikasi	Sosialisasi	Koordinasi
Durasi	-0.299*	0.221	0.206
Frekuensi	-0.210	0.029	0.326**
Ragam saluran	-0.109	-0.107	0.118
Situasi	-0.141	-0.069	0.378**
Aspek KP	0.014	-0.040	-0.140

Ket: * signifikan pada $p < 0.05$

** signifikan pada $p < 0.01$

r_s = koefisien korelasi *rank* Spearman

Dari ketiga indikator pemanfaatan internet oleh Pengelola Sekretariat DKP Provinsi, komunikasi dan koordinasi yang mempunyai nilai koefisien korelasi yang berhubungan nyata dengan indikator keterdedahan internet. Durasi berhubungan nyata dengan komunikasi namun memiliki koefisien korelasi

negatif. Hal ini berarti Pengelola Sekretariat DKP Provinsi cenderung pasif dalam membangun komunikasi melalui internet dengan berbagai kelompok masyarakat, swasta, dan pemangku kepentingan terkait lainnya. Frekuensi dan situasi keterdedahan mempunyai hubungan sangat nyata dan positif terhadap koordinasi. Koordinasi yang dilakukan Pengelola Sekretariat DKP Provinsi dengan sesama Pengelola Sekretariat DKP baik secara vertikal maupun horizontal cukup sering dilakukan dan relatif tidak terkendala oleh situasi waktu maupun tempat.

Pengelola Sekretariat DKP Provinsi membutuhkan waktu yang cukup lama untuk melakukan komunikasi, sedangkan untuk koordinasi cenderung lebih singkat dan dapat dilakukan dalam frekuensi yang lebih banyak. Tabel 7 menunjukkan bahwa frekuensi berhubungan sangat nyata dan positif dengan koordinasi oleh Pengelola Sekretariat DKP Provinsi. Hal ini menunjukkan Pengelola Sekretariat DKP telah memanfaatkan internet dengan baik untuk melakukan koordinasi.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan tujuan penelitian serta hasil dan pembahasan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa : Pengelola Sekretariat DKP Provinsi mempunyai keterdedahan internet yang cukup baik dilihat dari rata-rata skor indikator durasi, frekuensi, ragam saluran, situasi keterdedahan, dan aspek ketahanan pangan. Namun demikian, pemanfaatan internet masih belum optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai Pengelola Sekretariat DKP Provinsi.

Karakteristik individu Pengelola Sekretariat DKP pada indikator umur, masa kerja, dan pelatihan berhubungan nyata dengan keterdedahan internet pada indikator ragam saluran. Motivasi penggunaan internet pada indikator motivasi intrinsik berhubungan nyata dengan keterdedahan internet pada indikator durasi dan situasi keterdedahan. Keterdedahan internet pada indikator durasi, frekuensi dan situasi keterdedahan berhubungan nyata dengan pemanfaatan internet pada indikator komunikasi dan koordinasi

Berdasarkan hasil dan pembahasan serta simpulan, dapat diajukan saran sebagai berikut: (1) Pengelola Sekretariat DKP Provinsi sebagai salah satu penyelenggara pemerintahan di bidang ketahanan pangan perlu mengarahkan kompetensi dan pengetahuan penggunaan internet yang dimiliki untuk lebih optimal dalam mendukung tugas dan fungsinya. (2) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparatur pemerintah melalui pelatihan terkait pemanfaatan internet. (3) Perlu penelitian lebih lanjut dengan fokus pada media internet tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

- [APJII] Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. 2016. Penetrasi dan Perilaku Penggunaan Internet Indonesia. [internet] Jakarta (ID): [diunduh 2016 Nov 5]. Tersedia pada: <https://www.apjii.or.id/survei2016>.
- Blank G. 2013. Who creates content? *Information, Comm & Society*. 16 (4): 590-612.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2015. Jumlah pegawai negeri sipil. [internet] Jakarta (ID): [diunduh 2017 Feb 2]. Tersedia pada: <https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id>
- Briones RL, Kuch B, Liu BF, Jin Y. 2011. Keeping up with the digital age: How the American Red Cross uses social media to build relationships. *Public Relation Review*. 37(1):37-43.
- Buluamang YMO. 2017. Transparansi komunikasi dalam birokrasi pemerintahan. *Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan*. 21(1):49-57.
- Chuzairi A. 2016. Analisis determinan implementasi e-government di pemerintah daerah Indonesia [internet]. Semarang (ID): Universitas Negeri Semarang. [diunduh 2017 Jan 3]. Tersedia pada: <https://eprints.uns.ac.id/29834/>.
- Darmajaya. 2016. Upaya pengembangan e-governance pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*. 1(1):28-38.
- Dhita LH. 2012. Kemampuan literasi informasi aparatur negara di 15 dinas Kota Depok dalam menjalankan tugas. *Jurnal Ilmu Informasi dan Perpustakaan*. 10(2): 34-41.
- [DKP] Dewan Ketahanan Pangan. 2010. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan. Jakarta (ID): DKP.
- Elian N. 2014. Penggunaan internet dan pemanfaatan informasi pertanian oleh penyuluh pertanian di Kabupaten Bogor Wilayah Barat. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*. 12(2):104-109.
- Giles D. 2003. *Media Psychology*. New Jersey (US): Lawrence Erlbaum.
- Gunawong P. 2015. Open government and social media: a focus on transparency. *Social Science Computer Review*. 33(5):587-598.
- Khazaeli S, Stockemer D. 2013. The internet, a new route to good governance. *International Political Science Review*. 34(5): 463-482.
- [Kominfo] Kementerian Informasi dan Komunikasi 2016. Indonesia raksasa teknologi digital Asia. [internet] Jakarta (ID): [diunduh 2017 Maret 12] Tersedia pada: https://www.kominfo.go.id/content/detail/6095/indonesia-raksasa-teknologi-digital-asia/0/sorotan_media

- [Korpri] Korps Pegawai Republik Indonesia 2016. Survei Buktikan PNS sudah melek teknologi informasi. [internet] Jakarta (ID): [diunduh 2017 Feb 2] Tersedia pada: <https://korpri.id/berita/981/survei-buktikan-pns-sudah-melek-teknologi-informasi>
- Nugroho AC. 2015. Interkoneksi dan pembangunan e-government. *J Studi Komunikasi dan Media*. 19(2): 209-224.
- Poushter J. 2016. Smartphone ownership and internet usage continues to climb in emerging economies. [internet] Washington (US): [diunduh 2017 Juni 11]. Tersedia pada: <http://www.pewglobal.org/2016/02/22/smartphone-ownership-and-internet-usage-continues-to-climb-in-emerging-economies/>
- Rachmat M. 2015. Percepatan pembangunan pangan menuju pencapaian ketahanan pangan yang mandiri dan berdaulat. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*. 33(1): 1-17.
- Rustam M. 2014. Literasi internet aparatur pemerintah. *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*. 18(2):199-206.
- Setiawan H, Santoso P. 2013. Model optimalisasi peluang pemanfaatan media jejaring sosial dalam implementasi e-governance di Indonesia.[internet] Yogyakarta (ID): [diunduh 2017 Feb 17]. Tersedia pada:<http://jurnal.upnyk.ac.id/index.php/semnasif/article/view/854>
- Suryana A. 2014. Menuju ketahanan pangan indonesia berkelanjutan 2025: Tantangan dan penanganannya. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*. 32(3): 123-125.
- West R, Turner L. 2010. Pengantar Teori Komunikasi: Analisis dan Aplikasi. Jakarta (ID): Salemba Humanika.